

PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN SOSIALISASI SEBAGAI VARIABEL MODERATING

(Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan yang Terdaftar di KPP Pratama Kota Padang Satu Tahun 2017-2020)

THE EFFECT OF TAX ADMINISTRATION SYSTEM MODERNIZATION ON TAXPAYER COMPLIANCE

WITH PERSONAL PERSONS WITH SOCIALIZATION AS A MODERATING VARIABLE

(Study on Non-Employee Individual Taxpayers Registered at KPP Pratama Padang One City 2017-2020)

Adnan Khozi Asra¹, Dudi Pratomo²

^{1,2} Universitas Telkom, Bandung

adnankhozi@student.telkomuniversity.ac.id¹, dudipratomo@telkomuniversity.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderating (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan yang Terdaftar di KPP Pratama Kota Padang Satu Tahun 2017 - 2020), variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan dalam penelitian ini : Struktur Organisasi, Prosedur Organisasi, Strategi Organisasi, Budaya Organisasi. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif dengan menggunakan kuesioner penelitian dan didistribusikan kepada 100 wajib pajak orang pribadi non karyawan yang terdaftar pada KPP pratama kota padang satu. Dari hasil pengujian menggunakan *software* SPSS 25, didapatkan hasil secara simultan bahwa : Struktur organisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, Prosedur Organisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, Strategi organisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, Budaya organisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, Sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderating tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. KPP pratama diharapkan dapat meningkatkan pelayanan yang baik terhadap wajib pajak, agar berdampak positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci: modernisasi, sistem administrasi, perpajakan, sosialisasi perpajakan, kepatuhan wajib pajak

Abstract

This study aims to determine the effect of modernization of the tax administration system on taxpayer compliance with taxation socialization as a moderating variable (Study on Non Employee Individual Taxpayers Registered at KPP Pratama Padang Satu City in 2017 - 2020), the variable of modernization of the tax administration system in this study. : Organizational Structure, Organizational Procedure, Organizational Strategy, Organizational Culture. The research method used is quantitative research using research questionnaires and distributed to 100 individual non-employee taxpayers who are registered at the KPP Pratama Padang one city. From the test results using SPSS 25 software, the results simultaneously show that: Organizational structure has no effect on taxpayer compliance, Organizational procedures have no effect on taxpayer compliance, Organizational strategy does not affect taxpayer compliance, Culture organization has no effect on taxpayer compliance, Socialization of taxation as a moderating variable has no effect on taxpayer compliance. KPP pratama is expected to improve good service to taxpayers, so that it has a positive impact on increasing taxpayer compliance.

Keywords: modernization, administrative system, taxation, tax socialization, taxpayer compliance.

1. Pendahuluan

Pajak memiliki peranan yang sangat penting bagi penerimaan kas negara, dimana pajak merupakan iuran yang berasal dari rakyat untuk kas negara yang sifatnya memaksa tanpa adanya imbalan secara langsung, dengan tujuan untuk kesejahteraan rakyat itu sendiri. Sehubungan dengan itu perkembangan mengenai perpajakan terus berlangsung hingga sekarang ini disamping itu terus dilakukan perubahan-perubahan untuk memaksimalkan

pendapatan negara melalui pajak. Oleh karena itu, perlu diadakan reformasi perpajakan di Indonesia. Dari awal berdiri sampai saat ini DJP beberapa kali menjalankan agenda perubahan. Pada tahun 1983 terjadi perubahan yang cukup besar, beberapa Undang-Undang baru di bidang perpajakan disahkan untuk mengganti Undang-Undang lama peninggalan Belanda (Sarunan, 2015:3)¹³.

Pada tahun 1983 terjadi perubahan yang cukup besar, beberapa Undang-Undang baru di bidang perpajakan disahkan untuk mengganti Undang-Undang lama peninggalan Belanda (Sarunan, 2015:3)¹³.



System perpajakan diubah dari *Official Assessment* menjadi *Self Assesment* dimana wajib pajak berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya ke kantor pelayanan pajak, atau bisa melalui system administrasi perpajakan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Menurut Sari (Sarunan 2015)¹³ Perubahan system ini bertujuan untuk mengurangi kontak langsung antara aparat pajak dengan wajib pajak yang sebelumnya dikhawatirkan dapat menimbulkan praktek-praktek illegal untuk menghindari atau mengurangi kewajiban perpajakan para wajib pajak yang bersangkutan.

Ada beberapa tujuan dari pelaksanaan modernisasi sistem administrasi perpajakan, pertama mengoptimalkan penerimaan berdasarkan *data base*, minimalisasi *tax group*, dan *stimulus fiskal*. Kedua meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Ketiga efisiensi administrasi, yaitu penerapan sistem administrasi yang handal dan pemanfaatan teknologi informasi dan yang terakhir, membentuk citra dan kepercayaan yang baik dari masyarakat untuk mencapai masyarakat yang memiliki sumber daya manusia yang profesional, budaya organisasi yang kondusif, dan pelaksanaan *good governance* (Sarunan, 2015)¹³

Menurut Adi Wisatra (Listya Sugiyarti, 2017)¹⁴ struktur organisasi adalah unsur yang berkaitan dengan pola-pola peran yang sudah ditentukan dan hubungan antara peran, alokasi kegiatan kepada sub unit, pendistribusian wewenang diantara posisi administratif dan jaringan komunikasi formal.

Berdasarkan fungsi, tugas dan tanggung jawab sehingga akan dapat memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam melaporkan dan menyetorkan pajak yang terutang. Dengan kemudahan yang dirasakan oleh wajib pajak dalam melaporkan atau menyetorkan pajak akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian (Agustini & Supadmi, 2016)⁹ menyatakan bahwa struktur organisasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut Sofyan (Listya Sugiyarti, 2017)¹⁴ prosedur organisasi adalah proses komunikasi, pengambilan keputusan, pembahasan, dan pemahaman pada aktivitas organisasi yang dilakukan secara teratur. Prosedur organisasi memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian (Agustini & Supadmi, 2011)⁹ prosedur organisasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut Sofyan (Agustini & Supadmi, 2016)⁹ strategi organisasi merupakan suatu proses penyusunan cara atau langkah yang dilakukan dengan memanfaatkan berbagai macam peluang, sumber daya dan keadaan lingkungan untuk mencapai tujuan dari organisasi. Melalui penyampaian informasi dan penyuluhan perpajakan yaitu dengan penyusunan konsep program, system dan metode yang sistematis dan komprehensif, peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan diklat penyuluhan pajak, intensifikasi penerimaan pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak melalui modernisasi strategi organisasi. Dalam penelitian (Agustini & Supadmi, 2016)⁹ strategi organisasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut Sofyan (Agustini & Supadmi, 2016)⁹ budaya organisasi merupakan nilai-nilai atau kepercayaan yang tumbuh di dalam suatu organisasi yang secara tidak langsung menjadi sebuah kebiasaan bagi para anggotanya. Budaya organisasi dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak apabila dalam suatu organisasi tersebut memiliki sumber daya yang berkualitas. Menurut penelitian (Agustini & Supadmi, 2016)⁹ budaya organisasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain menggunakan variabel bebas, penelitian ini juga menggunakan variabel moderasi. Menurut Sugiyono (2017)¹⁷, variabel moderasi merupakan variabel yang digunakan untuk memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel. Variabel moderasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosialisasi perpajakan. Tujuan dari sosialisasi perpajakan adalah untuk memberikan pemahaman tentang informasi kepada masyarakat terkait system perpajakan dan perundang-undangan yang berlaku. Sosialisasi perpajakan sangat diperlukan yang akan berdampak kepada kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil penelitian menurut (Suarni & Marlina, 2019)¹⁵ sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dasar Teori dan Metode Penelitian

Dasar Teori

Teori Pajak

Defenisi Pajak menurut pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu : Kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi dan badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Sudrajat (Wardani & Wati, 2018)¹⁹ sosialisasi perpajakan berarti suatu upaya yang dilakukan untuk memberikan informasi mengenai perpajakan yang bertujuan agar seseorang ataupun kelompok paham tentang perpajakan sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Jika wajib pajak diberikan pemahaman yang baik dan benar melalui sosialisasi, maka wajib pajak akan memiliki pengetahuan tentang pentingnya membayar pajak.

Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Penerapan sistem administrasi perpajakan melalui program dan kegiatan dalam rangka reformasi administrasi perpajakan jangka menengah diuraikan dalam dimensi-dimensi variabel Sistem Administrasi Perpajakan Modern, yakni :

a. Struktur Organisasi

Merupakan bentuk layanan kepada masyarakat dengan memperbaharui jalur penyelesaian pelayanan



kepada Wajib Pajak agar dalam pelaksanaannya Wajib Pajak dengan mudah menyelesaikan segala kegiatan perpajakannya, sehingga bentuk dari pelayanan tersebut diharapkan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

1. Pembentukan organisasi berdasarkan fungsi
 2. Spesifikasi tugas dan tanggung jawab
 3. Menyelesaikan dan menyempurnakan sistem informasi
- b. Strategi Organisasi.
- Suatu tindakan yang bertujuan memanfaatkan segala keadaan, factor, peluang dan sumber daya sehingga tujuan organisasi dapat dicapai.
1. Melakukan kampanye sadar dan peduli pajak
 2. Penyederhanaan sistem administrasi perpajakan
 3. Bekerja sama dengan instansi lain
- c. Prosedur Organisasi.
- Menjelaskan langkah langkah dari sistem dan rangkaian kegiatan yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan tertentu.
1. Dukungan teknologi informasi modern
 2. Pengambilan keputusan berdasarkan *Standar Operating Procedure*
 3. Ketentuan perpajakan yang berlaku meliputi hukum, keadilan, dan kesederhanaan
- d. Budaya Organisasi
- Budaya Organisasi adalah kepercayaan dan nilai nilai yang berkembang dalam organisasi dan mengarahkan perilaku anggota- anggotanya.
1. Menerapkan kode etik terhadap pegawai DJP
 2. Penyiapan SDM yang berkualitas dan profesional
 3. Melakukan penyempurnaan sistem manajemen SDM

Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi merupakan suatu upaya DJP memberikan informasi dan pembinaan kepada Wajib Pajak mengenai segala sesuatu yang ada korelasinya dengan bidang perpajakan.

Menurut Winerungan (Rizki, Srikandi, Achmad, 2015)¹⁰ DJP memberikan beberapa indikator sosialisasi dimana kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan kesadaran dan rasa peduli terhadap pajak yang dimodifikasi dari pengembangan program layanan perpajakan.

Hipotesis

- H1 : Struktur Organisasi Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
- H2 : Prosedur Organisasi Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
- H3 : Strategi Organisasi Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
- H4 : Budaya Organisasi Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
- H5 : Struktur Organisasi, Prosedur Organisasi, Strategi Organisasi, Budaya Organisasi Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi sebagai Variabel Moderasi

Metode Penelitian

Metode pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah 100 Wajib Pajak Non Karyawan yang terdaftar Di KPP Pratama Kota Padang Satu,. Dalam penelitian ini digunakan teknik penelitian *deskriptif dan Kausal* dengan kriteria sebagai berikut:. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda, yang dapat dijabarkan persamaannya sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \mu$$

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_1 \beta_2 \beta_3 \beta_4 M + \mu$$

Keterangan

Y	= Kepatuhan Wajib Pajak
α	= Konstanta
β	= Koefisien Regresi
X1	= Struktur Organisasi
X2	= Prosedur Organisasi
X3	= Strategi Organisasi
X4	= Budaya Organisasi
M	= Sosialisasi Perpajakan
μ	= Error

Pembahasan

Hasil Uji Validitas

Menurut Sugiyono (2016)¹⁶ Syarat dalam pengujian validitas bahwa jika koefisien korelasi $r > 0,30$ maka item dinyatakan valid dan ketika item dinyatakan tidak valid maka koefisien korelasi $r < 0,30$.

Tabel 1 Hasil Pengujian Validitas

NO	Variabel	t hitung	r Sig. 0,30	Keterangan
Struktur Organisasi (X1)				
1.		0,746	0,30	Valid
2.		0,611	0,30	Valid
3.		0,893	0,30	Valid
Prosedur Organisasi (X2)				
4.		0,716	0,30	Valid
5.		0,874	0,30	Valid
6.		0,889	0,30	Valid
Strategi Organisasi (X3)				
7.	1	0,654	0,30	Valid
8.	2	0,692	0,30	Valid
9.	3	0,703	0,30	Valid
10.	4	0,505	0,30	Valid
Budaya Organisasi (X4)				
11.		0,858	0,30	Valid
12.		0,862	0,30	Valid
Sosialisasi Perpajakan (M)				
13.	1	0,628	0,30	Valid
14.	2	0,891	0,30	Valid
15.	3	0,526	0,30	Valid
16.	4	0,881	0,30	Valid
17.	5	0,848	0,30	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)				
18.	1	0,559	0,30	Valid
19.	2	0,781	0,30	Valid
20.	3	0,750	0,30	Valid
21.	4	0,609	0,30	Valid
22.	5	0,794	0,30	Valid
23.	6	0,748	0,30	Valid
24.	7	0,619	0,30	Valid
25.	8	0,589	0,30	Valid
26.	9	0,445	0,30	Valid

Sumber: Data yang telah di olah menggunakan software SPSS 25

Dari hasil uji validitas diatas diketahui bahwa koefisien korelasi T diketahui yaitu 0,30 dilihat dari tabel 1 maka koefisien T untuk variabel struktur organisasi, prosedur organisasi, strategi organisasi, budaya organisasi, sosialisasi perpajakan, kepatuhan wajib pajak lebih besar dari nilai koefisien r dengan nilai positif, maka kesimpulan dari uji validitas yang dilakukan adalah butir-butir pertanyaan yang ada pada masing-masing variabel dinyatakan valid dan tidak ada butir pertanyaan yang perlu di *drop out* atau di keluarkan.

Uji Realibilitas

Pada penelitian ini penulis menggunakan uji statistik *Cronbach Alpha* (α) untuk mengukur realibilitas. Sebuah variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha $> 0,6$. (Sugiyono, 2017:130)¹⁷

Tabel 2 Uji Realibilitas

Variabel	lah Butir Pertanyaan	Cronbach Alpha	Keterangan
Struktur Organisasi	3 pertanyaan	0,626	Reliabel
Prosedur Organisasi	3 pertanyaan	0,766	Reliabel
Strategi Organisasi	4 pertanyaan	0,654	Reliabel
Budaya Orgnisasi	2 pertanyaan	0,648	Reliabel
Sosialisasi Perpajakan	5 pertanyaan	0,796	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	9 pertanyaan	0,835	Reliabel

(Sumber : Data yang telah di olah menggunakan software SPSS 25)

Dari Tabel 2 dapat dilihat nilai *Cronbach Alpha* dari masing masing variabel yaitu yang pertama variabel independen struktur organisasi mendapatkan nilai *cronbach alpha* sebesar 0,626, variabel independen 2 yaitu prosedur



organisasi mendapatkan nilai *cronbach alpha* 0,766, variabel independen 3 yaitu strategi organisasi mendapatkan nilai *cronbach alpha* 0,654, variabel independen 4 yaitu budaya organisasi mendapatkan nilai *cronbach alpha* sebesar 0,648, selanjut nya variabel moderasi yaitu sosialisasi perpajakan mendapatkan nilai *cronbach alpha* sebesar 0,796, variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak mendapatkan nilai *cronbach alpha* 0,835, dari penjabaran diatas maka dapat disimpulkan bahwa semua pertanyaan dari setiap variabel dinyatakan reliabel dikarenakan nilai *cronbach alpha* dari tiap variabel lebih besar (>) dari 0,6 menurut (Sugiyono,2017:130)¹⁷ nilai *cronbach alpha* telah mengidikasikan bahwa semua variabel tersebut reliabel dan dapat digunakan dalam penelitian serta menunjukan bahwa responden konsisten dalam menjawab semua pertanyaan dalam kuesioner.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Model regresi yang berdistribusi normal atau mendekati normal dapat dikatakan sebagai model regresi yang baik. Berdasarkan hal tersebut dilakukan uji normalitas untuk mengetahui terdistribusi normal atau tidak variabel yang digunakan. Statistik *Kolmogorov-Smirnov Test* digunakan untuk pengujian normalitas. Jika nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* > $\alpha=0,05$ maka data berdistribusi normal dan begitu sebaliknya. Ghazali (Agustini & Supadmi 2016)⁹.

Tabel 3. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		67
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	4.24166043
Most Extreme Differences	Absolute	.089
	Positive	.087
	Negative	-.089
Test Statistic		.089
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

(Sumber : Output SPSS 25)

Dari tabel 3 dapat dilihat output dari hasil uji normalitas yang dilakukan penulis dengan menggunakan *software* SPSS 25 menunjukan hasil *Asymp. Sig. (2-tailed)* 0,200 yang artinya nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* > $\alpha=0,05$. Dengan demikian, berdasarkan hasil signifikansi menunjukan bahwa data yang digunakan pada penelitian ini terdistribusi normal.

Uji Heterokedastisitas

Untuk mengetahui terjadi atau tidaknya ketidaksamaan varian pada model regresi maka dilakukan uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji *Glejser*. Pengujian ini membandingkan taraf signifikan, jika hasil sig > 0,05, maka model regresi terbebas dari heteroskedastisitas. Agustini & Supadmi (Ghozali, 2005:143)

Tabel 4 Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	-2.823	4.542		.621
	Struktur Organisasi	.261	.282	.124	.925
	Prosedur Organisasi	-.074	.245	-.049	.765

Strategi Organisasi	-.051	.192	-.035	-.265	.792
Budaya Organisasi	.212	.301	.094	.703	.485
Sosialisasi Perpajakan	.130	.158	.137	.822	.414



a. Dependent Variable: Kepatuhan

Sumber: Output SPSS 25

Dari tabel 4 dapat dilihat output dari hasil uji heterokedastisitas yang dilakukan penulis dengan menggunakan *software* SPSS 25 menunjukkan hasil uji *glejser* sig > 0,05 menunjukkan bahwa struktur organisasi, prosedur organisasi, strategi organisasi, budaya organisasi, sosialisasi perpajakan, kepatuhan wajib pajak terbebas dari heterokedastisitas

Uji Multikolinearitas

Model regresi yang baik adalah tidak terjadi korelasi, maka dari itu dilakukan uji multikolinearitas untuk mengetahuinya. Berdasarkan nilai tolerance atau *variance inflation factor* (VIF) peneliti dapat mengetahui ada atau tidaknya multikolinearitas dalam model regresi. Jika nilai *tolerance* > 0,1 atau nilai VIF < 10, maka model dikatakan bebas dari gejala multikolinearitas. Ghazali (Agustini & Supadmi)⁹

Tabel 5. Uji Multikolinearitas Dengan Nilai Tolerance & VIF

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	26.089	7.277		3.585	.001		
	Struktur Organisasi	-.720	.452	-.201	-1.592	.117	.861	1.161
	Prosedur Organisasi	.450	.393	.176	1.146	.256	.582	1.719
	Strategi Organisasi	.321	.308	.128	1.043	.301	.907	1.103
	Budaya Organisasi	.158	.483	.041	.326	.745	.862	1.160
	Sosialisasi Perpajakan	.345	.254	.212	1.358	.179	.560	1.785

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Output SPSS 25

Dari tabel 5. dapat dilihat output dari hasil uji multikolinearitas yang dilakukan penulis dengan menggunakan *software* SPSS 25 menunjukkan hasil variabel menunjukkan bahwa struktur organisasi, prosedur organisasi, strategi organisasi, budaya organisasi, sosialisasi perpajakan, terbebas dari multikolinearitas

Pengujian Hipotesis

Analisis Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda adalah suatu alat analisis peramalan nilai pengaruh dua variabel independen atau lebih terhadap variabel dependen untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan fungsi atau hubungan kausal antara dua variabel independen atau lebih dengan satu variabel independen. (Sugiyono, 2016)⁷.

Tabel 6. Hasil Uji Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	26.089	7.277		3.585	.001
	Struktur Organisasi	-.720	.452	-.201	-1.592	.117
	Prosedur Organisasi	.450	.393	.176	1.146	.256
	Strategi Organisasi	.321	.308	.128	1.043	.301
	Budaya Organisasi	.158	.483	.041	.326	.745
	Sosialisasi Perpajakan	.345	.254	.212	1.358	.179

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Output SPSS 25



Berdasarkan hasil dari regresi linear berganda yang ada pada tabel 4.15, maka disusunlah model regresi sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \mu$$

$$Y = 26,089 - 0,720X_1 + 0,450X_2 + 0,321X_3 + 0,345X_4 + \mu$$

$$Y = 26,089 - 0,720X_1 + 0,450X_2 + 0,321X_3 + 0,158X_4 + 0,345M + \mu$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

α = Konstanta

β = Koefisien Regresi

X1 = Struktur Organisasi

X2 = Strategi Organisasi

X3 = Prosedur Organisasi

X4 = Budaya Organisasi

μ = Error

- Nilai *constant* sebesar 26,089 menunjukkan bahwa jika variabel independent struktur organisasi, prosedur organisasi, strategi organisasi, budaya organisasi, sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi bernilai (0), maka kepatuhan wajib pajak yang terdaftar pada kantor pelayanan pajak pratama kota padang satu tahun 2017- 2020 adalah sebesar 26,089. Jika tidak terdapat struktur organisasi, prosedur organisasi, strategi organisasi, budaya organisasi, sosialisasi perpajakan maka wajib pajak yang terdaftar pada kantor pelayanan pajak pratama kota padang satu tahun 2017- 2020 tetap melakukan kepatuhan terhadap perpajakan
- Variabel Struktur Organisasi (X1) sebesar -0,720 bertanda negatif menunjukkan bahwa setiap terjadinya peningkatan satuan struktur organisasi dengan variabel lain bernilai (0), maka kepatuhan wajib pajak yang terdaftar pada kantor pelayanan pajak pratama padang satu pada tahun 2017-2020 akan menurun sebesar 70,2%. Hal ini menunjukkan bahwa ketika struktur organisasi meningkat maka kepatuhan wajib pajak mengalami penurunan kesatuan .
- Variabel Prosedur organisasi(X2) sebesar 0,450 bertanda positif menunjukkan bahwa setiap terjadinya peningkatan 1% prosedur organisasi dengan variabel lain bernilai (0), maka kepatuhan wajib pajak yang terdaftar pada kantor pelayanan pajak pratama padang satu pada tahun 2017-2020 akan naik sebesar 45%, hal ini menunjukkan bahwa ketika prosedur organisasi meningkat maka kepatuhan wajib pajak mengalami peningkatan.
- Variabel Strategi Organisasi (X3) sebesar 0,321 bertanda positif menunjukkan bahwa setiap terjadinya peningkatan 1% strategi organisasi dengan variabel lain bernilai (0), maka kepatuhan wajib pajak yang terdaftar pada kantor pelayanan pajak pratama padang satu pada tahun 2017-2020 akan naik sebesar 32,1%, hal ini menunjukkan bahwa ketika strategi organisasi meningkat maka kepatuhan wajib pajak mengalami peningkatan.
- Variabel Budaya Organisasi (X4) sebesar 0,158 bertanda positif menunjukkan bahwa setiap terjadinya peningkatan 1% budaya organisasi dengan variabel lain bernilai (0), maka kepatuhan wajib pajak yang terdaftar pada kantor pelayanan pajak pratama padang satu pada tahun 2017-2020 akan naik sebesar 15,8%, hal ini menunjukkan bahwa ketika budaya organisasi meningkat maka kepatuhan wajib pajak mengalami peningkatan
- Variabel Sosialisasi Perpajakan (M) sebesar 0,345 bertanda positif menunjukkan bahwa setiap terjadinya peningkatan 1% sosialisasi perpajakan dengan variabel lain bernilai (0), maka kepatuhan wajib pajak yang terdaftar pada kantor pelayanan pajak pratama padang satu pada tahun 2017-2020 akan naik sebesar 34,5%, hal ini menunjukkan bahwa ketika sosialisasi perpajakan meningkat maka kepatuhan wajib pajak mengalami peningkatan.

Uji Koefisien Determinasi Berganda (R^2)

Kemampuan model dalam menerangkan variasi dari variabel dependennya diukur dengan menggunakan uji koefisien determinasi. Nilai koefisien determinasi ditunjukkan dengan nilai *adjusted R square* (R^2) adalah antara 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai (R^2) yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati 1 (satu) berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.

Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Determinasi Berganda

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate

1	.373 ^a	.139	.084	4.300
a. Predictors: (Constant), Budaya Organisasi, Strategi Organisasi, Struktur Organisasi, Prosedur Organisasi				

Sumber : Output SPSS 25



Dari tabel 7. Uji Koefisien Determinasi Berganda (R^2) menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,084 atau 8,4%, hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel struktur organisasi(X1), prosedur organisasi(X2), strategi organisasi(X3), budaya organisasi(X4), berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak(Y) sebesar 8,4%.

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi Berganda

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.405 ^a	.164	.096	4.271
a. Predictors: (Constant), Sosialisasi Perpajakan, Struktur Organisasi, Strategi Organisasi, Budaya Organisasi, Prosedur Organisasi				

Sumber : Output SPSS 25

Dari tabel 8 Uji Koefisien Determinasi Berganda (R^2) menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi (R Square) naik sebesar 0,096 hasil tersebut dipengaruhi dengan adanya sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi. Variabel struktur organisasi(X1), prosedur organisasi(X2), strategi organisasi(X3), budaya organisasi(X4), sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak(Y) sebesar 9,6%.

Uji Simultan (Uji F)

Untuk menguji layak atau tidaknya model penelitian maka dilakukan uji kelayakan model (Uji F), dan membandingkan nilai Fhitung dengan Ftabel. Jika hasil dari Uji F menyatakan signifikan F atau Probabilities value $\leq 0,05$, Fhitung > Ftabel maka H_0 ditolak dan H_a diterima ataupun sebaliknya.

Tabel 9. Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	218.896	5	43.779	2.400	.047
	Residual	1112.746	61	18.242		
	Total	1331.642	66			
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak						
b. Predictors: (Constant), Sosialisasi Perpajakan, Struktur Organisasi, Strategi Organisasi, Budaya Organisasi, Prosedur Organisasi						

Sumber : Output SPSS 25

Berdasarkan tabel 9. hasil Uji Simultan (F) yang telah dilakukan penulis diatas didapatkan nilai signifikan F atau Probabilities $0,047 \leq 0,05$ Fhitung $2.400 > Ftabel 2.37$. Dengan demikian didapatkan hipotesis yaitu H_0 ditolak dan H_a diterima yang artinya variabel independent dan variabel moderasi berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependent. Maka dapat kesimpulan dalam penelitian ini variabel independent yaitu struktur organisasi, prosedur organisasi, strategi organisasi, budaya organisasi, dan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi bersama-sama berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependent yaitu kepatuhan wajib pajak

Hasil Uji Parsial

Uji hipotesis (uji t) dilakukan untuk menguji pengaruh variabel independen pada variabel dependennya. Taraf nyata (α) yang digunakan 0,05 atau 5 persen. H_a diterima atau variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen, jika tingkat signifikansi $t_{hitung} \leq \alpha = 0,05$, dan begitupula sebaliknya.

Tabel 10. Hasil Uji Parsial (Uji T)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	26.089	7.277		3.585	.001
	Struktur Organisasi	-.720	.452	-.201	-1.592	.117
	Prosedur Organisasi	.450	.393	.176	1.146	.256
	Strategi Organisasi	.321	.308	.128	1.043	.301
	Budaya Organisasi	.158	.483	.041	.326	.745
	Sosialisasi Perpajakan	.345	.254	.212	1.358	.179

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Output SPSS 25

Pada tabel hasil Uji Parsial (T) di atas, terlihat berdasarkan t hitung dengan t tabel pada variabel X1 (Struktur Organisasi) bahwa nilai t hitung adalah $-1,592 < t \text{ tabel } 1,99834$ dan berdasarkan nilai signifikansinya yaitu $0,117 > 0,05$. Dengan demikian didapatkan hipotesis yaitu variabel X1 (Struktur Organisasi) secara individu (parsial) tidak memiliki pengaruh terhadap variabel Y (H0 diterima dan Ha ditolak). Maka dalam penelitian ini variabel bebas (Independen) yaitu Struktur Organisasi secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel terkait (Dependen) yaitu Kepatuhan Wajib Pajak.

Pada tabel hasil Uji Parsial (T) di atas, terlihat berdasarkan t hitung dengan t tabel pada variabel X2 (Prosedur Organisasi) bahwa nilai t hitung adalah $1,146 < t \text{ tabel } 1,99834$ dan berdasarkan nilai signifikansinya yaitu $0,256 > 0,05$. Dengan demikian didapatkan hipotesis yaitu variabel X2 (Prosedur Organisasi) secara individu (parsial) tidak memiliki pengaruh terhadap variabel Y (H0 diterima dan Ha ditolak). Maka dalam penelitian ini variabel bebas (Independen) yaitu Prosedur Organisasi secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel terkait (Dependen) yaitu Kepatuhan Wajib Pajak.

Pada tabel hasil Uji Parsial (T) di atas, terlihat berdasarkan t hitung dengan t tabel pada variabel X3 (Strategi Organisasi) bahwa nilai t hitung adalah $1,043 < t \text{ tabel } 1,99834$ dan berdasarkan nilai signifikansinya yaitu $0,301 > 0,05$. Dengan demikian didapatkan hipotesis yaitu variabel X3 (Strategi Organisasi) secara individu (parsial) tidak memiliki pengaruh terhadap variabel Y (H0 diterima dan Ha ditolak). Maka dalam penelitian ini variabel bebas (Independen) yaitu Strategi Organisasi secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel terkait (Dependen) yaitu Kepatuhan Wajib Pajak.

Pada tabel hasil Uji Parsial (T) di atas, terlihat berdasarkan t hitung dengan t tabel pada variabel X4 (Budaya Organisasi) bahwa nilai t hitung adalah $0,326 < t \text{ tabel } 1,99834$ dan berdasarkan nilai signifikansinya yaitu $0,745 > 0,05$. Dengan demikian didapatkan hipotesis yaitu variabel X4 (Budaya Organisasi) secara individu (parsial) tidak memiliki pengaruh terhadap variabel Y (H0 diterima dan Ha ditolak). Maka dalam penelitian ini variabel bebas (Independen) yaitu Budaya Organisasi secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel terkait (Dependen) yaitu Kepatuhan Wajib Pajak.

Pada tabel hasil Uji Parsial (T) di atas, terlihat berdasarkan t hitung dengan t tabel pada variabel Moderasi (Sosialisasi Perpajakan) bahwa nilai t hitung adalah $1,358 < t \text{ tabel } 1,99834$ dan berdasarkan nilai signifikansinya yaitu $0,179 > 0,05$. Dengan demikian didapatkan hipotesis yaitu variabel Moderasi (Sosialisasi Perpajakan) secara individu (parsial) tidak memiliki pengaruh terhadap variabel Y (H0 diterima dan Ha ditolak). Maka dalam penelitian ini variabel Moderasi yaitu Sosialisasi Perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel terkait (Dependen) yaitu Kepatuhan Wajib Pajak.

Pembahasan dan Hasil Penelitian

Pengaruh Struktur Organisasi, Prosedur Organisasi, Strategi Organisasi, Budaya Organisasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Sosialisasi Perpajakan sebagai variabel moderasi

Berdasarkan hasil Uji Simultan pada tabel 4.18 hasil Uji Statistik (F) yang telah dilakukan penulis diatas didapatkan Fhitung $2,400 > F \text{ tabel } 2,37$ dan berdasarkan nilai signifikansi (Sig.) $0,047 < 0,05$. Dari tabel 4.16 Uji Koefisien Determinasi Berganda (R^2) naik sebesar 0,164 atau 16,4%, hasil tersebut dipengaruhi dengan adanya sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi. Variabel struktur organisasi(X1), prosedur organisasi(X2), strategi organisasi(X3), budaya organisasi(X4), sosialisasi perpajakan (M) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak(Y) sebesar 16,4%.

Hasil dari penelitian diatas sesuai dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh (Layon & Suriani, 2020), (Suarni & marlina, 2019) bahwa struktur organisasi, strategi organisasi, prosedur organisasi, budaya organisasi sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Dengan demikian didapatkan hipotesis yaitu H0 ditolak dan Ha diterima yang artinya variabel bebas (Independen) dan variabel moderasi secara simultan berpengaruh terhadap variabel terkait (Dependen) Maka didapatkan kesimpulan dalam

penelitian ini yaitu Struktur Organisasi, Prosedur Organisasi, Strategi Organisasi, Budaya Organisasi dan Sosialisasi Perpajakan bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terkait (Dependen) yaitu Kepatuhan Wajib Pajak, yang mana semakin tinggi Struktur Organisasi, Prosedur Organisasi, Strategi Organisasi, Budaya Organisasi dan Sosialisasi Perpajakan maka Kepatuhan Wajib Pajak semakin tinggi.



Pengaruh Struktur Organisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel 4.19 hasil Uji Parsial (T) di atas, terlihat berdasarkan t hitung dengan t tabel pada variabel X1 (Struktur Organisasi) bahwa nilai t hitung adalah $-1,592 < t \text{ tabel } 1,99834$ dan berdasarkan nilai signifikansinya yaitu $0.117 > 0.05$. Dengan demikian didapatkan hipotesis yaitu variabel X1 (Struktur Organisasi) secara individu (parsial) tidak memiliki pengaruh terhadap variabel Y (H0 diterima dan Ha ditolak).

Hal tersebut didukung oleh analisis yang dilakukan pada item pertanyaan struktur organisasi yang menunjukkan bahwa sebanyak 19 responden merasa sangat setuju, 36 responden merasa setuju, dan 12 responden menjawab netral terhadap kemudahan pelayanan dengan adanya *Account Representative* dapat memberikan konsultasi kepada wajib pajak mengenai kewajiban perpajakannya. Dari analisis tersebut maka dapat dinyatakan bahwa jumlah responden yang merasa sangat setuju, setuju, netral (tidak memberikan pendapat) memiliki rentan jumlah yang tidak banyak, oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin tinggi ataupun semakin rendah tingkat struktur organisasi pada kantor pelayanan pajak pratama kota padang satu tidak berpengaruh terhadap kepatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak. Hal ini tercermin juga pada hasil uji T yang menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh yang terjadi apabila struktur organisasi yang tinggi terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kemudian penelitian ini diperkuat dalam penelitian Aryati & Putritanti (2016) wajib pajak merasa *account representative* kurang mengayomi dan dapat membantu memberikan konsultasi yang optimal terhadap wajib pajak. Hal tersebut dapat disebabkan karena jumlah *account representative* di dalam lingkungan petugas pajak kurang memadai dan tidak sebanding dengan banyaknya wajib pajak orang pribadi yang terdaftar, sehingga manfaat yang diterima oleh wajib pajak dirasa kurang maksimal.

Maka dalam penelitian ini variabel bebas (Independen) yaitu Struktur Organisasi secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel terkait (Dependen) yaitu Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya oleh Aryati & Putritanti (2016) bahwa Struktur Organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh Prosedur Organisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel 4.19 hasil Uji Parsial (T) di atas, terlihat berdasarkan t hitung dengan t tabel pada variabel X2 (Prosedur Organisasi) bahwa nilai t hitung adalah $1,146 < t \text{ tabel } 1,99834$ dan berdasarkan nilai signifikansinya yaitu $0.256 > 0.05$. Dengan demikian didapatkan hipotesis yaitu variabel X2 (Prosedur Organisasi) secara individu (parsial) tidak memiliki pengaruh terhadap variabel Y (H0 diterima dan Ha ditolak).

Hal tersebut didukung oleh analisis yang dilakukan pada item pertanyaan prosedur organisasi yang menunjukkan bahwa sebanyak 13 responden merasa sangat setuju, 31 responden merasa setuju, 24 responden menjawab netral terhadap waktu dalam menyelesaikan administrasi yaitu pembayaran dan pelaporan dilakukan dengan cepat, artinya birokrasi lancar dan tidak berbelit-belit. Dari analisis tersebut maka dapat dinyatakan bahwa jumlah responden yang merasa sangat setuju, setuju, netral (tidak memberikan pendapat) memiliki rentan jumlah yang tidak banyak, oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin tinggi ataupun semakin rendah tingkat prosedur organisasi pada kantor pelayanan pajak pratama kota padang satu tidak berpengaruh terhadap kepatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak. Hal ini tercermin juga pada hasil uji T yang menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh yang terjadi apabila prosedur organisasi yang tinggi terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hal ini disebabkan Prosedur yang rumit akan menyebabkan kesulitan tersendiri bagi wajib pajak. Ketidaktahuan wajib pajak menyebabkan mereka enggan melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak.

Pengaruh Strategi Organisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel 4.19 hasil Uji Parsial (T) di atas, terlihat berdasarkan t hitung dengan t tabel pada variabel X2 (Prosedur Organisasi) bahwa nilai t hitung adalah $1,043 < t \text{ tabel } 1,99834$ dan berdasarkan nilai signifikansinya yaitu $0.301 > 0.05$. Dengan demikian didapatkan hipotesis yaitu variabel X3 (Strategi Organisasi) secara individu (parsial) tidak memiliki pengaruh terhadap variabel Y (H0 diterima dan Ha ditolak).

Hal tersebut didukung oleh analisis yang dilakukan pada item pertanyaan strategi organisasi yang menunjukkan bahwa sebanyak 13 responden merasa sangat setuju, 30 responden merasa setuju, 19 responden menjawab netral, dan 5 responden menjawab tidak setuju terhadap sistem pelaporan pajak secara elektronik dapat memberikan kemudahan bagi wajib pajak. Dari analisis tersebut maka dapat dinyatakan bahwa jumlah responden yang merasa sangat setuju, setuju, netral (tidak memberikan pendapat), maupun tidak setuju memiliki rentan jumlah yang tidak banyak, oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin tinggi ataupun semakin rendah tingkat strategi organisasi pada kantor pelayanan pajak pratama kota padang satu tidak berpengaruh terhadap kepatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak. Hal ini tercermin juga pada hasil uji T yang menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh yang terjadi apabila strategi organisasi yang tinggi terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dapat disimpulkan bahwa wajib pajak belum memanfaatkan dengan adanya modernisasi yang dilakukan pemerintah dalam hal strategi organisasi. Wajib pajak merasakan kesulitan dalam pemanfaatan ditawarkan pemerintah melalui sistem perpajakan yang baru dengan adanya pembayaran secara online, pelaporan pajak secara online, dan *complaint center*

Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan tabel 4.19 hasil Uji Parsial (T) di atas, terlihat berdasarkan t hitung dengan t tabel pada variabel X2 (Prosedur Organisasi) bahwa nilai bahwa nilai thitung adalah $0,326 < t_{tabel} 1,99834$ dan berdasarkan nilai signifikansinya yaitu $0.745 > 0.05..$ Dengan demikian didapatkan hipotesis yaitu variabel X4 (Budaya Organisasi) secara individu (parsial) tidak memiliki pengaruh terhadap variabel Y (H_0 diterima dan H_a ditolak).



Hal tersebut didukung oleh analisis yang dilakukan pada item pertanyaan budaya organisasi yang menunjukkan bahwa sebanyak 25 responden merasa sangat setuju, 33 responden merasa setuju, 9 responden menjawab netral terhadap aparat pajak memberikan pelayanan yang sama terhadap semua wajib pajak tanpa memandang besar atau kecil nya pajak terutang. Dari analisis tersebut maka dapat dinyatakan bahwa jumlah responden yang merasa sangat setuju, setuju, netral (tidak memberikan pendapat) memiliki rentan jumlah yang tidak banyak, oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin tinggi ataupun semakin rendah tingkat budaya organisasi pada kantor pelayanan pajak pratama kota padang satu tidak berpengaruh terhadap kepatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak. Hal ini tercermin juga pada hasil uji T yang menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh yang terjadi apabila budaya organisasi yang tinggi terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hal ini tidak sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Agustini & Supadmi,2016) bahwa budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Karena budaya berkaitan dengan lingkungan organisasi, maka dengan terciptanya lingkungan yang baik akan meningkatkan kualitas pelayanan fiskus pajak yang lebih baik juga.

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel 4.19 hasil Uji Parsial (T) di atas, terlihat berdasarkan t hitung dengan t tabel pada variabel X2 (Prosedur Organisasi) bahwa nilai bahwa nilai thitung adalah $1,358 < t_{tabel} 1,99834$ dan berdasarkan nilai signifikansinya yaitu $0.179 > 0.05$. Dengan demikian didapatkan hipotesis yaitu variabel X4 (Budaya Organisasi) secara individu (parsial) tidak memiliki pengaruh terhadap variabel Y (H_0 diterima dan H_a ditolak).

Hal tersebut didukung oleh analisis yang dilakukan pada item pertanyaan sosialisasi perpajakan yang menunjukkan bahwa sebanyak 8 responden merasa sangat setuju, 51 responden merasa setuju, 7 responden menjawab netral dan 1 responden menjawab tidak setuju terhadap aparat pajak menawarkan kenyamanan pelayanan dalam memberikan informasi kepada wajib pajak dengan lengkap melalui brosur. Dari analisis tersebut maka dapat dinyatakan bahwa jumlah responden yang merasa sangat setuju, setuju, netral (tidak memberikan pendapat) maupun tidak setuju memiliki rentan jumlah yang tidak banyak, oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin tinggi ataupun semakin rendah tingkat sosialisasi perpajakan pada kantor pelayanan pajak pratama kota padang satu tidak berpengaruh terhadap kepatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak. Hal ini tercermin juga pada hasil uji T yang menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh yang terjadi apabila budaya organisasi yang tinggi terhadap kepatuhan wajib pajak

Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Winerungan dalam Rizki dkk(2015) bahwa dengan kurang intensifnya sosialisasi yang diberikan akan berdampak kepada rendahnya tingkat pemahaman wajib pajak sehingga berdampak kepada kepatuhan Wajib Pajak

Kesimpulan dan saran.

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan elemen struktur organisasi (X1), Prosedur Organisasi (X2) Strategi Organisasi (X3), Budaya Organisasi (X4) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Sosialisasi sebagai Variabel Moderasi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 67 orang Wajib Pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Padang Satu pada tahun 2017-2020. Berdasarkan hasil analisis deskriptif dan pengujian menggunakan model regresi linier berganda, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan analisis deskriptif, dapat disimpulkan bahwa
 - a. Rata-rata skor total variabel Struktur Organisasi menghasilkan angka sebesar 84,77, dalam garis kontinum termasuk dalam kategori sangat baik artinya tanggapan responden sangat tinggi terhadap variabel Struktur Organisasi
 - b. Rata-rata skor total variabel Prosedur Organisasi menghasilkan angka sebesar 80,09, dalam garis kontinum termasuk dalam kategori baik artinya tanggapan responden tinggi terhadap variabel Prosedur Organisasi
 - c. Rata-rata skor total variabel Strategi Organisasi menghasilkan angka sebesar 81,9, dalam garis kontinum termasuk dalam kategori baik artinya tanggapan responden tinggi terhadap variabel Strategi Organisasi
 - d. Rata-rata skor total variabel Budaya Organisasi menghasilkan angka sebesar 85,07 dalam garis kontinum termasuk dalam kategori sangat baik artinya tanggapan responden sangat tinggi terhadap variabel Budaya Organisasi
 - e. Rata-rata skor total variabel Sosialisasi Perpajakan menghasilkan angka sebesar 78,44 dalam garis kontinum termasuk dalam kategori baik artinya tanggapan responden tinggi terhadap variabel Sosialisasi Perpajakan
 - f. Rata-rata skor total variabel Kepatuhan Wajib Pajak menghasilkan angka sebesar 79,17 dalam garis kontinum termasuk dalam kategori baik artinya tanggapan responden tinggi terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak
2. Berdasarkan pengujian hipotesis secara simultan (Uji F) terhadap variabel struktur organisasi, prosedur organisasi, strategi organisasi, budaya organisasi, sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib

pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Padang Satu tahun 2017-2020

3. Struktur Organisasi tidak berpengaruh secara parsial (Uji T) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Padang Satu tahun 2017-2020
4. Prosedur Organisasi tidak berpengaruh secara parsial (Uji T) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Padang Satu tahun 2017-2020



5. Strategi Organisasi tidak berpengaruh secara parsial (Uji T) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Padang Satu tahun 2017-2020
6. Budaya Organisasi tidak berpengaruh secara parsial (Uji T) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Padang Satu tahun 2017-2020
7. Sosialisasi Perpajakan tidak berpengaruh secara parsial (Uji T) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Padang Satu tahun 2017-2020

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan saran sebagai berikut :

Aspek Teoritis

1. Bagi peneliti selanjutnya, dalam penelitian ini dapat dijadikan rujukan untuk penelitian selanjutnya tentang modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderating
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menambahkan variabel lain seperti sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan dll yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak
3. Bagi peneliti selanjutnya dapat menambah item pertanyaan budaya organisasi sehingga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
4. Bagi peneliti selanjutnya dapat menambah jumlah sampel sehingga dapat memperoleh hasil yang maksimal

Aspek Praktis

1. Bagi KPP Pratama Kota Padang Satu diharapkan dapat meningkatkan kinerja *account representative* sehingga dapat memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya
2. Bagi KPP Pratama Kota Padang Satu, diharapkan prosedur dalam pembayaran dan pelaporan perpajakan lancar dan tidak berbelit-belit
3. Bagi KPP Pratama Kota Padang Satu, diharapkan terus meningkatkan sosialisasi perpajakan kepada wajib pajak tentang sistem pelaporan perpajakan secara elektronik, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak
4. Bagi KPP pratama Kota Padang Satu, diharapkan terus meningkatkan SDM yang profesional sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan pajak yang baik

REFERENSI

- [1] Alvin, F., & Apollo. (2020). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama . *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 1(3), 229-237. <https://doi.org/10.31933/jemsi.v1i3.103>
- [2] Cahyanti, M. D. (2017). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Kondisi Keuangan Pengusaha Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kabupaten Magetan. *Skripsi Universitas Muhammadiyah Ponorogo*, 105–138.
- [3] Dewi Kusuma, E. W. (2018). PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen) . *JURNAL NOMINAL / VOLUME VII NOMOR 1*.
- [4] I Ni Luh Arismayani, I. G. (2017). PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN, MOTIVASI WAJIB PAJAK, DAN TINGKAT KEPERCAYAAN PADA PEMERINTAH DAN HUKUM TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK. *e-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program SI (Vol.8 No.2)*.
- [5] I Gede Darmayasa, P. E. (2016). PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN PADA KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol 14., 226-252.
- [6] Layon Hocben Hutagaol, S. B. (2020). Pengaruh Penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibitung. *JURNAL ONLINE INSAN AKUNTAN*, Vol 5, No, 1, 113-124.
- [7] Mardiasmo 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- [8] Ngongo, A. M. (2018). Analisis Hubungan Kualitas Pelayan, Sanksi Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Atambua). *Skripsi Universitas Sanata Dharma*.
- [9] Putu Agustini, N. L. (2016). PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI DAN SANKSI PERPAJAKAN PADA KEPATUHAN WAJIB PAJAK . *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.15.1*, 27-54.
- [10] Pasca Rizki Dwi Ananda, S. K. (2015). PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, TARIF PAJAK, DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi pada UMKM yang terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu). *Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol. 6 No 2*.
- [11] Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012, Kriteria Wajib Pajak
- [12] Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- [13] Sarunan, W. K. (4 Desember 2015). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado , Vol 3 no 4 hal 518-526.

- [14] Sugiyarti, L. (2017). Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang, ISSN : 2339-0867. Analisis Pengaruh Struktur, Prosedur, dan Strategi Organisasi dalam Reformasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada KPP Pratama Jakarta Pesangrahan) , Vol 5, No 1.
- [15] Suarni, & Marlina. (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak, Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Padang Satu. Academic Conference of Accounting I, 1, 399–414.
- [16] Sugiyono (2015). Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods). Bandung:Alfabeta.
- [17] Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta, CV
- [18] Titik Aryati, L. R. (n.d.). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi . *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN KEUANGAN*, 4(3)
- [19] Wati, D. K. (2018). Pengaruh Sosialisai Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Nominal Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, ISSN : 2303-2065 , Vol 7, No 1_.
- [20] https://sumbar.bps.go.id/indicator/13/427/1/realisasi-pendapatan-dan-belanja_pemerintah_kabupaten-kota-di-provinsi-sumatera-barat.html
- [21] <https://www.republika.co.id/berita/p5w30y382/wajib-pajak-lapor-spt-di-sumbar-masih>